

**ANALISIS PEMBANGUNAN PESISIR: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI PARIWISATA PANTAI LOSARI**

**Andi Ainun Juniarsi Nur¹,
Muhammad Fedryansyah²,
Nunung Nurwati³**

^{1,3}Program Studi Sosiologi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Padjadjaran

²Program Studi Kesejahteraan
Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran

*Corresponding author

Email: andi22019@mail.unpad.ac.id

No. doi: 10.24198/focus.v6i2.51458

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pembangunan masyarakat di wilayah pesisir kota Makassar. Desain penelitian yang digunakan adalah studi literatur berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Data yang digunakan berasal dari textbook, journal, artikel ilmiah. Teknik analisis data yang digunakan adalah mencari sumber yang relevan, lalu mencari bagian penting dan relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi dapat dirasakan oleh pedagang dan pelaku ekonomi di sekitar Kawasan reklamasi, sedangkan masyarakat nelayan pencari kerang mengalami kesulitan karena adanya reklamasi. Peran kelembagaan dalam pengembangan pariwisata di Kota Makassar masih didominasi oleh lembaga pemerintah, peran tersebut terus aktif terutama dalam program dan kebijakan, sedangkan dalam implementasinya banyak dilakukan oleh pihak swasta. Pengembangan wisata bahari di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan salah satu pendekatan terbaru kepada masyarakat pesisir. Hal ini merupakan wujud dari keinginan masyarakat untuk mempertahankan keberadaan sumber daya alam pesisir dan laut untuk pemenuhan kebutuhan mereka agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Kata-kata kunci: masyarakat pesisir, pembangunan ekonomi, pemberdayaan, reklamasi

ABSTRACT

This study aims to analyze the level of community development in the coastal areas of Makassar City. The research design used is a literature study regarding the method of collecting library data, reading and recording, and processing research materials. The data used comes from textbooks, journals, and scientific articles. The data analysis technique used is to search for relevant sources, then look for important and relevant parts of this research. The results showed that economic development can be felt by traders and economic actors around the reclamation area, while the shellfish fishing community experienced difficulties due to reclamation. The role of institutions in the development of tourism in Makassar City is still dominated by government institutions. The role continues to be active, especially in programs and policies, while its implementation is done by the private sector. The development of marine tourism in coastal areas and small islands is one of the latest approaches to coastal communities. This is a manifestation of the community's desire to maintain the existence of coastal and marine natural resources to fulfill their needs so that they can be utilized sustainably.

Keywords: coastal communities, economic development, empowerment, reclamation

PENDAHULUAN

Program pemberdayaan masyarakat yang dicanangkan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan (Hendratmoko & Marsudi, 2010; Natsir, 2018; Pattiasina et al., 2011; Ratnawati & Sutopo, 2014; Yasir et al., 2017). Pendekatan pemberdayaan Masyarakat dalam pengembangan masyarakat menekankan pentingnya kemandirian masyarakat lokal sebagai sebuah sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri (Satria, 2015). Lebih lanjut, Satria (2015) menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) akses dalam pemberdayaan masyarakat pesisir secara umum yaitu: (1) akses terhadap sumber daya alam adalah kemampuan masyarakat pesisir baik secara individu maupun kelompok untuk dapat memanfaatkan sumber daya pesisir, perikanan dan kelautan; (2) akses terhadap partisipasi, artinya masyarakat pesisir mendapatkan partisipasi mulai dari informasi, input, proses hingga output dan outcome yang dihasilkan dari partisipasi yang setara dan berkeadilan; (3) akses terhadap pasar, artinya masyarakat pesisir yang Sebagian besar adalah nelayan dapat menjual hasil tangkapan dan mengetahui informasi pasar yang sedang berkembang; dan (4) akses terhadap informasi dan pengetahuan adalah transformasi informasi, pengetahuan yang lancar antara masyarakat dengan masyarakat lainnya dan antara Masyarakat dengan pemerintah.

Kota Makassar merupakan salah satu kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang

memiliki wilayah pesisir. Menurut Dahuri (2002), belum ada definisi yang pasti mengenai wilayah pesisir secara alamiah. Namun demikian, terdapat kesepakatan umum bahwa wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Wilayah kota Makassar yang merupakan peralihan antara daratan dan lautan yang memanjang mengikuti garis pantai membentuk suatu wilayah pesisir. Di sepanjang wilayah pesisir kota Makassar masih terdapat potensi sumber daya alam yang belum dikelola secara optimal. Namun, di bagian lain terdapat pemanfaatan sumber daya alam yang bersifat eksploratif dan sektoral. Sebagai ibukota provinsi dan kota terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar memiliki aktivitas perekonomian yang cukup tinggi sehingga memberikan pengaruh nyata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat kota. Salah satu indikatornya adalah masih adanya permukiman kumuh di beberapa bagian kota yang ditandai dengan adanya kantong-kantong kemiskinan. Wilayah pesisir merupakan salah satu wilayah yang terpinggirkan, sehingga dapat menjadi kantong-kantong kemiskinan. Sulitnya menanggulangi kemiskinan di wilayah pesisir membuat wilayah pesisir menjadi rentan di bidang sosial ekonomi. Kerawanan di bidang sosial-ekonomi dapat menyebabkan timbulnya kerawanan di bidang kehidupan lainnya. Masyarakat nelayan menjadi miskin karena adanya ketimpangan sosial antara warga miskin dan kaya. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian pendidikan, standar

kesehatan, pranata sosial, akses terhadap modal usaha, teknologi, dan pemasaran.

Kemiskinan masyarakat nelayan sering disebut sebagai kelompok termiskin dari kelompok miskin kecuali jika mereka diberdayakan. Jika tidak, kemiskinan akan tetap ada di Masyarakat pesisir (Alencar & Maia, 2011; Circle, District, & Baishya, 2012; Hamdani & Wulandari, 2013; Mishra & Nishamani, 2015; Räikkä, 2014). Kemiskinan dan tekanan sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat nelayan berakar pada faktor yang kompleks dan saling terkait, yaitu faktor alam dan non-alam. Faktor alam berkaitan dengan fluktuasi musim penangkapan ikan dan struktur alami sumber daya ekonomi daerah. Faktor non-alamiah terkait dengan keterbatasan jangkauan teknologi penangkapan, ketimpangan sistem bagi hasil, dan ketiadaan jaminan sosial tenaga kerja yang pasti. Termasuk di dalamnya adalah lemahnya jaringan pemasaran dan kurang berfungsinya koperasi nelayan yang ada, serta dampak negatif dari kebijakan modernisasi perikanan yang telah berlangsung selama seperempat abad terakhir. Hasil perikanan di kota Makassar masih diperdagangkan dalam bentuk segar, hanya sebagian kecil yang diolah secara tradisional. Pemanfaatan potensi berbagai jenis komoditas yang bernilai ekonomi tinggi seperti ikan, udang, cumi-cumi, kepiting, sirip ikan hiu, dan biota perairan lainnya. Pengembangan agroindustri perikanan di kota Makassar diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan pengembangan sumberdaya perikanan untuk mengurangi pola pemanfaatan sumberdaya yang selama ini hanya diperjualbelikan dalam bentuk segar, sehingga secara bertahap dapat dihasilkan produk olahan yang memiliki kualitas dan nilai tambah, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Kebutuhan lain yang belum terpenuhi adalah kurangnya keterlibatan masyarakat pesisir dalam pembangunan, mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan relevansi.

Dengan demikian, masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam membangun diri mereka sendiri sehingga hak masyarakat untuk terlibat tidak terpenuhi. Dalam pandangan Iff dan Tesoriero (2006), tidak diragukan lagi bahwa partisipasi merupakan hak dan vital dalam aspirasi menuju demokrasi partisipatoris.

Melihat skala usaha perikanan, masyarakat miskin pesisir terdiri dari rumah tangga nelayan yang menangkap ikan tanpa menggunakan perahu, menggunakan perahu tanpa motor, dan perahu motor tempel. Dengan skala usaha tersebut, rumah tangga nelayan hanya dapat menangkap ikan di wilayah yang dekat dengan pantai. Pada kasus tertentu, nelayan memang dapat melaut jauh dari pantai dengan menjadi mitra perusahaan besar. Namun, usaha dengan hubungan kemitraan ini tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah rumah tangga nelayan yang sangat banyak. Wilayah pesisir Kota Makassar yang kaya akan potensi, mendorong berbagai pemangku kepentingan untuk mengeksploitasi secara berlebihan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Ancaman terhadap wilayah pesisir dapat berasal dari pencemaran perairan laut akibat limbah domestik dan limbah industri, masalah reklamasi pantai, pola penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, dan konflik pemanfaatan ruang antara masyarakat dengan pemangku kepentingan lainnya yang berakibat pada konflik sosial.

Mengembangkan wilayah pesisir, perlu diketahui akar permasalahan dan potensi yang dimiliki wilayah pesisir. Langkah pertama dalam upaya pemanfaatan wilayah pesisir secara berkelanjutan adalah mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir. Pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi tersebut dapat dikembangkan untuk pengelolaan sumber daya pesisir dan laut

secara berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan reorientasi kebijakan terhadap pola pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir di Kota Makassar. Sebagai langkah awal untuk menciptakan prakondisi reorientasi kebijakan pola pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, maka dilakukan penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan wilayah pesisir di Kota Makassar, baik kondisi eksisting, kecenderungan ke depan, maupun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kegagalan Pembangunan yang mungkin timbul. Para pemangku kepentingan telah melakukan banyak upaya untuk mengatasi permasalahan di wilayah pesisir namun belum menemukan jalan keluar. Dengan kata lain, wilayah pesisir masih terpinggirkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti akan membahas mengenai Analisis Pembangunan Pesisir Kota Makassar.

Analisis lebih lanjut menggunakan pemikiran Amartya Sen mengenai pemberdayaan, pembangunan manusia, dan teori keadilan. Pemikiran inti Amartya Sen adalah bahwa pembangunan sejati dan keadilan sosial seharusnya diukur berdasarkan kemampuan individu untuk mencapai berbagai fungsi dasar dalam kehidupan mereka, seperti memiliki akses kepada pendidikan, perawatan kesehatan, pangan, pekerjaan, dan kebebasan politik. Dalam perspektifnya, kebahagiaan dan kualitas kehidupan manusia tidak hanya tergantung pada pendapatan atau pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada kemampuan yang dimiliki individu untuk memilih dan mencapai berbagai fungsi dasar ini. Dengan demikian, Sen menyoroti pentingnya kebijakan yang mempromosikan pemberdayaan sosial dan kesetaraan akses, serta menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran kunci dalam menciptakan kondisi yang mendukung perkembangan manusia seutuhnya.

Pemikiran Amartya Sen dapat memberikan pandangan berharga dalam analisis reklamasi pantai Losari dengan menekankan pentingnya memahami dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari proyek tersebut. Sen akan mendukung analisis yang mencerminkan kebutuhan untuk mengukur kemampuan masyarakat lokal untuk mengakses dan mengembangkan sumber daya pantai yang telah direklamasi, mengidentifikasi dampaknya terhadap fungsi dasar seperti mata pencaharian dan akses ke lingkungan alami, serta menekankan perlunya mengintegrasikan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan reklamasi pantai.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Metode studi literatur berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Studi kepustakaan dilakukan oleh setiap peneliti dengan tujuan utama yaitu mencari dasar pijakan/fondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukandugaan sementara atau disebut juga dengan hipotesis penelitian. Sehingga para peneliti dapat mengelompokkan, mengalokasikan mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti mempunyai pendalaman yang lebih luas dan mendalam terhadap masalah yang hendak diteliti. Melakukan studi literatur ini dilakukan oleh peneliti antara setelah mereka menentukan topik penelitian dan ditetapkannya rumusan permasalahan, sebelum mereka terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

Data yang digunakan berasal dari *textbook*, *journal*, artikel ilmiah, literature

review yang berisikan tentang konsep Pembangunan masyarakat pesisir dan pemberdayaan Masyarakat. Dalam proses analisa dimulai dengan materi hasil penelitian yang secara sekuensi diperhatikan dari yang paling relevan, relevan, dan cukup relevan. Cara lain dapat juga, misalnya dengan melihat tahun penelitian diawali dari yang paling mutakhir, dan berangsur-angsur mundur ke tahun yang lebih lama. Lalu membaca abstrak dari setiap penelitian lebih dahulu untuk memberikan penilaian apakah permasalahan yang dibahas sesuai dengan yang hendak dipecahkan dalam penelitian. Mencatat bagian-bagian penting dan relevan dengan permasalahan penelitian, Untuk menjaga tidak terjebak dalam unsur plagiat, para peneliti hendaknya juga mencatat sumber-sumber informasi dan mencantumkan daftar pustaka. Jika memang informasi berasal dari ide atau hasil penelitian orang lain. Membuat catatan, kutipan, atau informasi yang disusun secara sistematis sehingga penelitian dengan mudah dapat mencari kembali jika sewaktu-waktu diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Sosial dan Lingkungan Pasca Reklamasi Pantai Losari

Kota Makassar memasuki tahun 2007 dengan mempersembahkan penataan kawasan Pantai Losari sebagai hadiah tahun baru bagi warganya. Kawasan yang menyimpan begitu banyak kenangan, tadinya adalah bandar dagang yang dihuni berbagai orang dari berbagai bangsa. Di tahun 1970-an, ketika Pantai Losari di sepanjang Jalan Penghibur itu mulai berubah fungsi menjadi kawasan rekreasi rakyat, dengan gerobak penjual makanan sebagai ciri utamanya, tak banyak yang mengira suatu saat kelak mereka akan tergusur. Pantai Losari yang dulu merupakan tempat perhelatan ekonomi rakyat kini ditata dengan anggaran Rp104 miliar, dan dipersembahkan sebagai hadiah tahun baru bagi warga kota Makassar sebagai ruang publik masa

depan. Pantai Losari memang memiliki perkembangan yang unik. Di masa kekuasaan Kerajaan Gowa-Tallo, pantai ini digunakan sebagai bandar dagang dan pelabuhan yang sangat ramai. Seiring dengan masuknya masa kolonial, kawasan pelabuhan itu akhirnya didominasi Belanda, sedangkan orang Arab, Gujarat, India, Cina, dsb ditempatkan di daerah yang jauh dari pelabuhan. Bangunan berarsitektur kolonial pun terbangun di sepanjang Pantai Losari, salah satunya rumah dinas Walikota Makassar yang untungnya masih berdiri hingga sekarang. Di era tahun 1970-an pantai yang dulunya sebagai bandar dagang tersebut berubah fungsi sebagai tempat rekreasi dengan bentuk dan sistem sederhana. Belum ada pengaturan dan peraturan menyangkut kenyamanan para pengunjung pantai.

Memasuki tahun 1990-an Losari mulai sedikit berbenah. Pemerintah kota melakukan berbagai langkah, salah satunya memberikan kompensasi berupa izin berjualan di pantai. Sejak adanya izin tersebut, pergerakan ekonomi rakyat di tempat ini makin merajalela. Di awal tahun 2000 muncul ide untuk kembali memperbaiki citra Losari sekaligus melakukan peningkatan mutu pantai. Tembok yang keropos di tambah beban bangunan serta polusi air yang makin menjadi-jadi menjadi alasan. Di pertengahan tahun 2001 usaha revitalisasi atas nama penyelamatan pantai terus digulirkan. Meskipun menimbulkan kontroversi namun pemerintah kota yang dipimpin Amiruddin Maula ketika itu terus menampakkan keseriusannya. Pemkot mulai melakukan penataan bagi 300-an pedagang kaki lima. Dengan darah dan airmata mereka mempertahankan lapak-lapak mereka namun akhirnya mereka harus rela di pindahkan di lokasi baru, Jl. Metro Tanjung Bunga, dengan janji tidak akan di pindahkan lagi. Pada dasarnya pencemaran perairan di Pantai Losari disebabkan perubahan fungsi-fungsi ruang kota di kawasan tersebut dari

perumahan menjadi kawasan komersil. Berbagai hotel terbangun di sepanjang pantai bahkan beberapa di antaranya menghalangi masyarakat menikmati keindahan pantai. Di sepanjang pantai pula, bermuara 14 outlet drainase kota, tujuh di antaranya adalah outlet besar, yang memberikan kontribusi terhadap tercemarnya perairan.

Tahun 2016 silam, peninjauan proyek reklamasi Centre Point of Indonesia (CPI), proyek ini berfungsi sebagai waterfront city tersebut, dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar. Perubahan yang terjadi selama rentan waktu proses pembangunan CPI adalah dampak positif pembangunan CPI yang dirasakan beberapa pihak seperti para pengusaha bisnis dan hiburan dalam mengekspansi bisnisnya, pemerintah daerah pada peningkatan PAD, masyarakat umum dengan perluasan lapangan kerja serta untuk menarik para investor. Dampak negatif pembangunan CPI pada perekonomian masyarakat pesisir sekitar yang berprofesi sebagai nelayan, petani tambak, buruh angkut serta pelaku UMKM, namun yang paling signifikan merasakan dampaknya adalah hasil tangkapan nelayan karena keragaman tangkapan berkurang berimplikasi terhadap penurunan jumlah rata-rata pendapatan nelayan, terjadinya pendangkalan dan akses yang sempit yang juga berimplikasi terhadap penambahan jumlah rata-rata untuk pengeluaran nelayan per trip, adanya kesenjangan disparitas antara pengunjung CPI dengan nelayan dan menurunnya kualitas hidup (sandang, pangan papan) nelayan.

Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kota Makassar

Perkembangan wilayah pesisir di Kota Makassar tidak lepas dari pengaruh perubahan lingkungan wilayah pesisir. Perubahan lingkungan tersebut berdampak pada masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pesisir. Oleh karena itu,

pemanfaatan atau pengelolaan wilayah pesisir harus melibatkan peran serta masyarakat. Pengaturan mengenai hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, termasuk di wilayah pesisir, tertuang dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya pada pasal 6 dan 7, serta peraturan lainnya, seperti UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir atau pulau-pulau yang struktur ekonominya bergantung pada laut. Potensi laut merupakan modal utama bagi kehidupan masyarakat.

Norma-norma lokal sangat mempengaruhi cara kerja mereka dalam melakukan penangkapan ikan dan pola penguasaan sumber daya perikanan mereka. Pemanfaatan wilayah pesisir seringkali dilakukan dengan pola pemanfaatan yang tidak teratur. Tidak memperhatikan norma-norma kearifan lokal pengelolaan sumber daya laut dan seringkali tidak memperhatikan kepentingan masyarakat di wilayah pesisir yang menjadikan laut sebagai sumber penghidupan. Terjadi kerusakan dan pencemaran di wilayah pesisir, seperti kerusakan hutan bakau (mangrove), kerusakan terumbu karang, dan pembuangan limbah industri. Kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir untuk pengembangan pariwisata dan industri di satu sisi merupakan pembangunan sosial ekonomi untuk kesejahteraan penduduk. Namun, di sisi lain, reklamasi dan pengerukan pantai memberikan dampak kerusakan fungsi pantai sebagai penahan abrasi air laut.

Upaya peningkatan peran serta masyarakat utama di wilayah pesisir harus diawali dengan sikap terbuka terhadap berbagai permasalahan dalam pengelolaan wilayah pesisir. Sikap terbuka ini untuk

mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, yang meliputi keterpaduan hubungan antar instansi pemerintah, antar instansi pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat berperan sebagai mitra pemerintah dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir. Peran masyarakat secara formal sudah diakui hanya saja mekanismenya belum jelas seperti audiensi untuk membahas masalah ganti rugi. Hal ini dijelaskan oleh pihak Kecamatan Mariso, bahwa "Partisipasi masyarakat sangat berguna bagi pembangunan wilayah pesisir, seperti masyarakat menginformasikan kepada pemerintah, meningkatkan kemauan masyarakat untuk menerima keputusan hingga membantu perlindungan 5 hukum". Sejalan dengan ancaman terhadap kelestarian lingkungan laut karena berkaitan dengan pihak-pihak atau kepentingan yang diuntungkan dengan adanya lingkungan laut yang lestari, yaitu: (1) pemukiman dan kesehatan masyarakat; (2) kepentingan rekreasi dan wisata; dan (3) kepentingan perikanan dan kekayaan hayati lainnya.

Pengelolaan sektor kelautan dan perikanan khususnya dengan hadirnya Dinas Kelautan dan Perikanan di era otonomi daerah, sudah seharusnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah memainkan peran dan fungsinya masing-masing sesuai dengan kewenangannya dan tetap memberikan kepastian bahwa pemanfaatan sumberdaya pesisir tetap memenuhi rasa keadilan masyarakat dan berpihak pada lingkungan. Jadi, kehadiran Dinas Kelautan dan Perikanan membawa visi Pembangunan sumberdaya pesisir dan laut beserta segenap sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terkandung di dalamnya, merupakan sumber penghidupan dan sumberdaya pembangunan yang harus berkelanjutan.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemakmuran rakyat menuju terwujudnya

bangsa Indonesia yang sejahtera, maju, dan mandiri. Dengan kata lain, dengan adanya Dinas Kelautan dan Perikanan, program-program pembangunan kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan secara sistematis untuk menghasilkan masyarakat yang sejahtera, khususnya masyarakat pesisir (Satria, 2015: 1). Sebagaimana data yang muncul dari reklamasi pantai Losari terhadap pendapatan masyarakat pesisir yang ditunjukkan pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Dampak Reklamasi Pantai Losari Terhadap Tingkat Pendapatan

Tanggapan Responden	Persentase (%)
Ada Peningkatan Pendapatan	32.5
Tidak ada Peningkatan Pendapatan	35.0
Tidak ada	32.5

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan 2019

Seringkali pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir tidak memperhatikan kepentingan masyarakat di wilayah pesisir. Bahkan mata pencarian yang selama ini menjadi tulang punggung kehidupan mereka terabaikan dan tidak tergantikan oleh pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir yang dibangun. Masyarakat lebih sering tergusur daripada diikutsertakan dalam proses pembangunan. Seperti pada tabel 1, dampak reklamasi terhadap tingkat pendapatan yang diungkapkan oleh 35% responden adalah tidak ada peningkatan pendapatan. Pantai Losari merupakan salah satu ikon kota Makassar yang menjadi tempat rekreasi alternatif bagi warga kota Makassar yang mengalami perubahan yang sangat pesat. Reklamasi kota Losari telah mengubah kondisi Losari yang dulunya cukup kumuh kini berkembang menjadi lebih modern dengan pesatnya pembangunan tempat wisata dan bisnis.

Dalam penelitian yang dilakukan Naim Umar tentang perubahan sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar pantai Losari dapat dikemukakan bahwa rata-rata usia tinggal di daerah tersebut adalah 38 tahun dengan lama tinggal 23 tahun, rata-rata pendapatan kepala keluarga adalah Rp. 1.838.889/bulan. Sedangkan mata pencarian utama masyarakat adalah pedagang dan wiraswasta. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut rata-rata alumni SMA. Dampak reklamasi terhadap perubahan pendapatan yang diperoleh bahwa tidak ada pengaruh pendapatan atau perekonomian setelah adanya reklamasi pantai Losari. Seperti pada hasil wawancara dengan Andi Akmar, salah satu warga yang tinggal di sekitar 6 pantai Losari, "reklamasi pantai Losari tidak dapat memberikan peningkatan pendapatan. Selama sepuluh tahun bekerja sebagai pencari kerang, tidak ada peningkatan pendapatan yang signifikan, apalagi dengan adanya reklamasi pantai Losari".

Masalah ini banyak dialami oleh para nelayan yang tinggal di sekitar pantai Losari, terutama nelayan yang mencari kerang untuk dijual di sepanjang Pantai Losari. Pedagang merupakan salah satu masyarakat yang diuntungkan dengan adanya reklamasi, dimana rata-rata pedagang warung mengalami peningkatan pendapatan. Salah satu penyebabnya adalah semakin banyaknya masyarakat yang berkunjung ke Pantai Losari dan mencari tempat tinggal karena lebih dekat dengan tempat kerja, khususnya yang berada di sekitar pantai Losari. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pesisir atau pulau-pulau yang struktur ekonominya bergantung pada laut. Perkembangan ekonomi dapat dirasakan oleh para pedagang dan pelaku ekonomi di sekitar area reklamasi, sedangkan masyarakat nelayan pencari

kerang mengalami kesulitan akibat reklamasi.

Peran Kelembagaan dalam Pengembangan Pariwisata Pesisir di Kota Makassar

Kelembagaan dapat berarti suatu bentuk, wadah, atau organisasi dan juga mengandung pengertian norma, aturan, tata cara, atau prosedur yang mengatur hubungan antar manusia. Bahkan kelembagaan merupakan suatu sistem yang rumit, kompleks, dan abstrak. Oleh karena itu, perlu dianalisis mengenai kelembagaan yang terlibat dalam pengembangan pariwisata pesisir di Kota Makassar. Pada wilayah pesisir, pengelolaan seluruh aspek sumberdaya yang terkandung di dalamnya harus secara sinergis dimanfaatkan secara optimal agar seperti tujuan pemanfaatan multiguna. Pada dekade terakhir ini pengelolaan wilayah pesisir menjadi perhatian penting sebagai salah satu sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yang harus dilakukan adalah pendekatan ekosistem dan pendekatan ekonomi dan kelembagaan, yang dimaksudkan agar pemanfaatan dan penggunaan wilayah pesisir dapat dilaksanakan secara Lestari dan berkesinambungan antar generasi. Instansi pemerintah dan lembaga non pemerintah yang berperan dalam pengembangan pariwisata pesisir di Kota Makassar.

Institusi yang berperan dalam pengembangan pariwisata pesisir kota Makassar adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah Sulawesi Selatan, dan pemerintah kota Makassar. Partisipasi dalam pengelolaan lingkungan pariwisata adalah peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan, pengendalian, penilaian lingkungan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberikan masukan berupa pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, dan material, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil pengelolaan lingkungan pariwisata. Besarnya manfaat lingkungan

pariwisata yang dapat dinikmati oleh para pelaku sangat tergantung dari kemampuan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan lingkungan.

Kegagalan dalam pengembangan pariwisata pesisir dapat disebabkan oleh perbedaan visi dan misi dari masing-masing lembaga, sehingga hal ini dapat memicu terjadinya konflik kepentingan. Penataan kelembagaan berkaitan dengan aturan main atau koordinasi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Pemberdayaan yang direalisasikan oleh pemerintah dan swasta di wilayah pesisir kota Makassar adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang dilaksanakan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Program pemulihan ekosistem pesisir dan laut oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar. Namun, hal ini tidak optimal karena pelaku pemberdayaan masyarakat yang disebut Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) tidak berjalan dengan baik. Pelaksananya ditangani oleh orang-orang yang memiliki sumber daya manusia yang kurang memadai, terutama moral bagi para pelaku PEMP. Keterlibatan Pemerintah Kota Makassar yang menjadi elemen kunci dalam analisis ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir kota Makassar menjadi penentu utama dalam keberhasilan sebuah lembaga dalam memfasilitasi hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat pesisir kota Makassar.

Oleh karena itu, peran kelembagaan adalah kerangka acuan atau hak-hak yang dimiliki individu untuk berperan dalam struktur kehidupan, juga berarti perilaku dan struktur setiap pelaku ekonomi yang disebut kelembagaan. Setiap masyarakat harus diperlakukan dan dilayani sesuai dengan kelompok usaha dan kegiatan ekonominya. Pemberdayaan masyarakat nelayan membutuhkan alat tangkap dan kepastian wilayah tangkapan. Berbeda dengan masyarakat petani, yang mereka

butuhkan adalah modal kerja dan modal investasi serta masyarakat pengolah dan tenaga kerja. Kebutuhan masing-masing kelompok yang berbeda menunjukkan keragaman pola pemberdayaan yang akan diterapkan pada masing-masing kelompok. Dengan demikian, program untuk masyarakat pesisir harus dirancang sedemikian rupa tanpa menyamaratakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dan antara satu daerah dengan daerah pesisir lainnya.

Pemberdayaan masyarakat pesisir harus bersifat *bottom-up* dan *open menu*, namun yang terpenting adalah pemberdayaan itu sendiri harus menyentuh kelompok masyarakat sasaran. Sejauh ini, pemerintah telah melaksanakan banyak program pemberdayaan, salah satunya adalah Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir secara berkelanjutan (Satria, 2015). Terkait dengan program PEMP.

Pemerintah Kota Makassar melakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

1. Kelembagaan. Untuk memperkuat posisi tawar masyarakat, mereka harus dihimpun dalam sebuah lembaga yang solid untuk menyalurkan semua aspirasi dan tuntutan mereka dengan baik. Lembaga ini juga dapat menjadi penghubung antara pemerintah dan pihak swasta. Selain itu, lembaga ini juga dapat menjadi wadah untuk memastikan terjadinya dana produktif antar kelompok.
2. Pendampingan. Pendampingan sangat diperlukan dalam setiap program pemberdayaan. Masyarakat belum mampu berjalan mungkin karena ketidaktahuan, rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan, dan masih kuatnya tingkat ketergantungan karena belum pulihnya rasa percaya diri akibat paradigma pembangunan masa lalu.

Terlepas dari hal tersebut, peran pendamping sangat vital terutama untuk mendampingi masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Namun yang terpenting dari pendampingan ini adalah menempatkan orang yang tepat pada kelompok yang tepat.

3. Pengembangan. Dalam program PEMP juga disediakan dana untuk mengembangkan usaha produktif yang menjadi pilihan masyarakat itu sendiri. Setelah kelompok penerima manfaat berhasil, mereka harus menyisihkan keuntungannya untuk digulirkan kepada masyarakat lain yang membutuhkan. Pengaturan perguliran akan disepakati dalam sebuah forum atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sendiri yang difasilitasi oleh pemerintah daerah atau tenaga pendamping.

Berdasarkan uraian di atas, peran kelembagaan dalam pengembangan pariwisata di Kota Makassar didominasi oleh lembaga pemerintah. Peran tersebut terus aktif terutama dalam program dan kebijakan. Sedangkan dalam pelaksanaannya banyak dilakukan oleh pihak swasta.

Arahan Pengembangan Wilayah Pesisir Kota Makassar

Pemerintah Kota Makassar terus berupaya mengembangkan potensi pesisir melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan wisata bahari. Kota Makassar memiliki Pantai yang cukup luas sehingga pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diharapkan dapat menjadi surga bagi wisatawan karena diarahkan pada pengembangan wisata bahari yang berbasis konservasi dan kemasyarakatan. Pemerintah Kota Makassar telah melakukan beberapa Langkah sebagai wujud nyata untuk mengelola sumber daya alam demi keberlanjutan pemanfaatannya. Pengembangan wisata bahari di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan

salah satu pendekatan terbaru kepada masyarakat pesisir. Pengembangan wisata bahari dianggap sebagai wujud dari keinginan masyarakat untuk menjaga kekuatan sumber daya alam pesisir dan laut agar dapat memenuhi kebutuhan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Pengembangan wisata bahari sebagai destinasi unggulan di Kota Makassar sangat prospektif, mengingat Kota Makassar terletak di ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dan berada di pesisir selatan Pulau Sulawesi yang memiliki 11 pulau kecil. Pulau-pulau kecil tersebut adalah Pulau Kayangan, Pulau Samalona, Pulau Kodingarengkeke, dan Pulau Lanyukang, dengan luas 178,5 hektare atau 1,1 persen dari luas daratan. Selain itu, kawasan ini memiliki hamparan terumbu karang dan padang lamun yang indah, panorama pantai dan laut yang indah, serta kaya akan keanekaragaman potensi sumber daya pulau-pulau kecil yang mendukung pemanfaatan jasa pariwisata.

Pemerintah Kota Makassar berupaya mengembangkan kawasan pesisir dan laut Kota Makassar secara langsung sebagai wisata pantai Losari, Pantai Akkarena, Pantai Tanjung Bunga, dengan kegiatan wisata seperti berperahu dan berenang di air, memancing, dan olahraga pantai lainnya. Sebagai perbandingan, wisata taman hiburan dan outbond yang dikembangkan adalah Trans Studio dan Pantai Akkarena. Wisata sejarah dan budaya terdapat di Benteng Rotterdam, Benteng Somba Opu, Taman Mini Indonesia Indah, dan Pelabuhan Rakyat Paotere.

Dampak reklamasi pantai Losari terhadap kenaikan harga tanah secara signifikan pasca reklamasi Pantai Losari. Dari hasil penelitian Naim Umar terjadi kenaikan harga tanah yang signifikan dari dampak reklamasi pantai Losari. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat dari luar pantai Losari yang ingin membeli tanah atau rumah di lokasi tersebut karena banyak proyek yang dibangun untuk

kegiatan bisnis di sekitar Pantai Losari. Salah satu pusat bisnis di sekitar area tersebut adalah pembangunan Trans Studio dan Rumah Sakit Siloam serta proyek-proyek lain yang sedang berjalan sehingga lahan di sekitar area tersebut banyak diincar bagi mereka yang ingin tinggal di dekat pusat bisnis tersebut.

Mencermati keberadaan potensi pesisir dan pulau-pulau kecil di Kota Makassar sebagai destinasi wisata unggulan pengembangan wisata bahari merupakan aset yang sangat berharga bagi pendapatan masyarakat dan pemerintah daerah. Terkait dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Dalam hal pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan wisata Bahari menjadi kewenangan Pemerintah Kota Makassar karena bidang pariwisata menjadi salah satu urusan pilihan Pemerintah Daerah. Dengan kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan pilihan di bidang pariwisata, Pemerintah Kota Makassar dituntut untuk lebih kreatif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari bidang pariwisata khususnya pariwisata bahari. Meskipun pariwisata merupakan urusan pilihan, namun dengan inovasi dan kreatifitas Pemerintah Kota Makassar dapat menjadikan sektor unggulan yang dapat meningkatkan perekonomian daerah.

Potensi wilayah pesisir di wilayahnya cukup luas sehingga harus diberdayakan secara maksimal. Garis pantai kota Makassar yang cukup luas merupakan potensi yang dapat dikembangkan bersama Masyarakat pesisir sangat memungkinkan.

Panjangnya pantai di kota Makassar, harus bisa memanfaatkannya menjadi sektor unggulan untuk membantu perekonomian masyarakat tanpa

menghilangkan akar adat dan budaya yang ada di Makassar. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan membuat patung yang berbentuk untuk merangsang ikan-ikan yang hidup di laut dan di sisi lain dapat menjadi nilai jual dari sektor pariwisata. Aktivitas nelayan di pesisir pantai Kota Makassar cenderung mengarah pada upaya mendukung perkembangan sektor pariwisata yang berkembang cukup pesat. Pulau-pulau kecil di sekitar Makassar juga turut berkontribusi dalam pengembangan pariwisata dengan memberikan dampak positif terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk nelayan. Dengan menggunakan sarana perahu tradisional, para nelayan tetap melaut bukan untuk menangkap ikan, melainkan untuk mengantar wisatawan lokal atau wisatawan asing yang ingin menikmati keindahan panorama alam bawah laut di sekitar pulau-pulau kecil di sekitar Makassar.

KESIMPULAN

Perkembangan ekonomi masyarakat dapat dirasakan oleh para pedagang dan pelaku ekonomi di sekitar kawasan reklamasi, sedangkan masyarakat nelayan pencari kerang mengalami kesulitan karena adanya reklamasi. Instansi pemerintah masih mendominasi peran kelembagaan dalam pengembangan pariwisata di Kota Makassar. Perannya sangat aktif terutama dalam program dan kebijakan, sedangkan dalam pelaksanaannya banyak dilakukan oleh pihak swasta. Pengembangan wisata bahari di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan salah satu pendekatan terbaru bagi masyarakat pesisir. Pengembangan wisata bahari dianggap sebagai perwujudan dari keinginan masyarakat untuk menjaga sumber daya alam pesisir dan laut untuk memenuhi kebutuhannya agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alencar, A. G., & Maia, L. C. P. (2011). *Socio-economic profile of the Brazilian fishermen*. Arq. Ciênc. Mar.
- Ainun, A., Nur, J., & Nurwati, N. (2023). Dampak Reklamasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Dan Kemiskinan di Kota Makassar. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 7(2), 152-163. <https://doi.org/10.24198/JSG.V7I2.47601.G20397>
- Amiruddin, Afni. (2017). Pola Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Kebijakan Reklamasi Pantai di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1):1-9.
- Attahmid, Andi Nur Achsanuddin Usdyn. (2018). Pengaruh Pembangunan Center Point of Indonesia (CPI) Terhadap Perekonomian Masyarakat Pesisir di Kecamatan Mariso Kota Makassar. *Jurnal Economic Resources*, 1(1):60-70.
- Billicocta, Y. (2016). *Geger reklamasi Pantai Makassar*. [Http://indo.band](http://indo.band).
- Circle, S. R., District, B., & Baishya, S. J. (2012). Human Development and Economic Growth: A Case Study on Traditional Assamese Fisherman of Niz-Saldah. *International Journal of Scientific and Research Publications*.
- Chandra, W. (2016). *Tolak Reklamasi Pantai Losari, Walhi Gugat Gubernur Sulsel ke PTUN*. <https://www.mongabay.co.id/2016/02/14/tolak-reklamasi-pantai-losari-walhi-gugat-gubernur-sulsel-ke-ptun/>
- Dahuri, R. 2002. *Kebijakan dan Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Djainal, H. (n.d.). *Reklamasi Pantai Dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan Fisik Di Wilayah Kepesisiran Kota Ternate (Coastal Reclamation and Its Influence to Physical Environment in the Coastal Area of Town Ternate)*.
- Hamdani, P. H., & Wulandari, R. K. (2013). *The Factor of Poverty Causes Traditional Fisherman*. Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa.
- Hendratmoko, C., & Marsudi, H. (2010). *Analisis Tingkat Keberdayaan Sosial Nelayan Tangkap di Kabupaten Cilacap*. *Dinamika Sosial Ekonomi*.
- Ife, J. & Tesoriero, F. 2006. *Community Development: Based Alternatives in on Age Globalisation*, Pearson Education Australia.
- Irawati, DT. (2012). Pantai Losari dulu dan saat ini: Perubahan Persepsi akan Ruang Publik.
- Mishra, D., & Nishamani. (2015). *Socio-Economic Profile of Kaibartta (Fisherman) Community-A Case Study in the Naduar Block of the Undivided Sonitpur District, Assam*. European Academic Research.
- Mappesona. (2016). *Ratusan Warga Makassar tanda tangani tolak reklamasi pantai*. [Http://merdeka.com](http://merdeka.com).
- Natsir, M. (2018). Strategies for Maritime-Based Economic Development in Konawe Islands in Southeast Sulawesi. *Journal of Economics and Public Finance*. <https://doi.org/10.22158/jepf.v4n1p16>
- Pattiasina, J. R., Baskoro, M. S., & Iskandar, B. H. (2011). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Kusu Lovra Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara*. Non-Publication.
- Räikkä, J. (2014). *Poverty*. In *Handbook of Global Bioethics*. https://doi.org/10.1007/978-94-007-2512-6_124
- Ratnawati, S., & Sutopo, H. H. (2014). *The Development of Model Empowerment Poor Society in Coastal Area Through Net Marketing*. Academic Research International.
- Satria, A. 2015. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Warjio. (2016). *Politik Pembangunan: Paradoks, Teori, Aktor dan Ideologi*. Jakarta: Kencana.
- Yasir, Y., Nurjanah, N., & Yesicha, C. (2017). A Model of Communication to Empower Fisherman Community in Bengkalis Regency. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*.

<https://doi.org/10.29313/mimbar.v33i2.2135>